

SKRIPSI

ANALISIS PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN
TENAGA KERJA INFORMAL DI KOTA RENGAT
(STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA)

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



OLEH :

INDRA RIFALDI
145 111 035

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN (S1)

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2018

ABSTRACTION
ANALYSIS OF INCOME AND WELFARE
INFORMAL EMPLOYMENT IN RENGAT CITY
(CASE STUDY OF FIVE FEET TRADERS)

BY:

INDRA RIFALDI
NPM. 145111035

(Under the guidance of: Advisor I : Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si dan
Advisor II : Drs. H. Armis, M.Si)

This research was conducted in Rengat City. The purpose of this study is to find out how much the income of informal workers in Rengat City and how the welfare of informal workers in the city of Rengat is a case study of street vendors. This study uses primary data obtained directly from the respondents of the study, which was carried out using a questionnaire instrument. and secondary data obtained from the Central Statistics Agency, Disperindag. Based on the results of the study, it can be seen that the income and welfare of street vendors in Rengat City has an average income of street vendors of Rp. 7,618,605 with the lowest revenue of street vendors of Rp. 2,800,000 and the highest income for street vendors is Rp. 14,000,000. dari hasil analisis kesejahteraan, di peroleh berdasarkan with the lowest revenue of street vendors of Rp. 2,800,000 and the highest income for street vendors is Rp. 14,000,000. Decent Life (KHL) can be seen that street vendors with average monthly income higher or equal to Decent Life (KHL) are as many as 41 people or 95.35% while street vendors with an average monthly income of less than or below Decent Life (KHL) are as many as 2 people or 4.65%. while street vendors with an average monthly income of less than or below Decent Life Life (KHL) are as many as 2 people or 4.65%. and based on the criteria of Bappenas, it is shown that the average family expenditure of street vendors for monthly non-staple needs is greater than the average family expenditure of street vendors for monthly basic needs. hus according to Bappenas criteria, it can be concluded that the family of street vendors can be categorized as prosperous. based on BPS criteria shows that generally street vendors with a moderate level of family welfare.

Keywords: Income, welfare.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada saya selaku penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA INFORMAL DI KOTA RENGAT (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA) ”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk studi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan dengan setulus – tulusnya terimakasih dan penghargaan kepada pihak yang membantu dan memberikan motivasi, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Abrar, M.Si, AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
2. Bapak Pembantu Dekan I,II,III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
3. Ibu Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Pembangunan sekaligus sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Armis, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak saran, perbaikan dan motivasi demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen penguji yang telah memberikan arahan dan saran yang sangat membangun dalam perbaikan skripsi ini.

6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua tercinta Ayahanda H.Darmus dan Ibunda Hj.Resfelni, serta abang dan kakak tercinta Renja Eka Putra, Rio Kurniawan dan Rhika Dwi Putri. dan keponakan tercinta Feyza Qaireen Ariana Putri yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang dan do'a untuk penulis
7. Ucapan terima kasih kepada sahabatku Jimmi Saputra, Erdiyanta, Danil Pasahdi, Rondy Chlnadi Pratama, Febri Romadhon, Rega Sutra Nanda, Nova Rumintang, Irwansyah, Andri Prayoga, dan Adi Putra, yang telah memberi dukungan penyemangat bagi penulis
8. Terima kasih juga buat teman – teman EP angkatan 2014 yang memberikan dukungan selama masa – masa indah perkuliahan, kalian juga merupakan hadiah indah yang Tuhan jumpakan dengan saya

Atas semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan berkat kepada mereka semua dan mudah – mudahan outline ini bermanfaat.

Pekanbaru, 12 Desember 2018

Penulis

INDRA RIFALDI

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA	
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.1.1. Teori Pendapatan	9
2.1.2. Teori Kesejahteraan	14
2.1.3. Sektor Informal	16
2.1.4. Tenaga Kerja	26
2.1.5. Pedagang Kaki Lima	30
2.1.6. Penelitian Terkait	33
2.2. Hipotesa	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	35
3.2 Populasi dan Sampel	35
3.3 Jenis dan Sumber Data	36

3.4 Metode Pengumpulan Data.....	37
3.5 Analisis Data.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
4.1 Keadaan Geografis Kota Rengat.....	39
4.2 Keadaan Penduduk Kota Rengat.....	41
4.3 Kehidupan Beragama.....	42
4.4 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	43
4.5 Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	45
4.6 Gambaran Tentang Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Rengat.....	47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Karakteristik Responden.....	50
5.2 Analisis Pendapatan Tenaga Kerja Sektor Informal di Kota Rengat.....	54
5.3 Analisis Kesejahteraan Tenaga Kerja Sektor Informal di Kota Rengat.....	55
5.4 Pembahasan.....	64
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan.....	69
6.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016.....	2
Tabel 1.2. Jumlah Pedagang Kaki lima di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017.....	4
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Rengat 2017.....	41
Tabel 4.2 Jumlah Tempat Ibadah Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Rengat.....	43
Tabel 4.3 Jumlah Sekolah Umum Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Rengat.....	45
Tabel 4.4 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kecamatan Rengat.....	46
Tabel 5.1 Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rengat Menurut Kelompok Umur Tahun 2018	51
Tabel 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	52
Tabel 5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tanggungan Keluarga	52
Tabel 5.4 Lama Responden Dalam Menjalankan Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Rengat	54

Tabel 5.5 Distribusi Rata-rata Pendapatan Responden Pedagang Kaki Lima di Kota Rengat	54
Tabel 5.6 Perbandingan Rata-rata Pendapatan Perbulan Responden terhadap Kehidupan Hidup Layak (KHL) di Kota Rengat	56
Tabel 5.7 Distribusi Rata-rata Pengeluaran Keluarga Pedagang Kaki Lima Untuk Kebutuhan Pokok Perbulan	58
Tabel 5.8 Distribusi Rata-rata Pengeluaran Keluarga Pedagang Kaki Lima Untuk Kebutuhan Bukan Pokok Perbulan	59
Tabel 5.9 Klasifikasi Tingkat Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima	62





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang, yang merencanakan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang adil dan makmur, untuk menentaskan masalah-masalah sosial yang semakin hari semakin meningkat. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi yang memperlihatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan sebuah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan disegala sektor, disamping itu upaya memperluas kesempatan kerja dan mengantisipasi pertumbuhan angka kerja yang menjadi tantangan bagi pemerintah.

Dalam hal ini pembangunan diarahkan meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan memperluas serta meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan penghidupan yang layak. Pemerataan pembangunan berarti juga pemerataan kesempatan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, guna meningkatkan kehidupan yang lebih minimal dapat memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan kesejahteraan sosial).

Berkembangnya sektor informal yang terjadi di kota-kota besar khususnya di negara berkembang seperti Indonesia disebabkan karena terbatasnya daya serap sektor modern atau formal terhadap angkatan kerja. Terbatasnya daya serap sektor formal atau modern karena tenaga kerja yang dibutuhkan adalah mereka yang mempunyai pendidikan atau keterampilan yang tinggi, namun disisi lain sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih mempunyai pendidikan yang rendah. Oleh sebab itu, tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal masuk ke sektor informal yang tidak membutuhkan persyaratan seperti di sektor formal.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu 2016

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Permpuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	84.43	48.04	66.76
Bekerja	81.34	44.68	63.54
Pengangguran	3.09	3.36	3.22
Bukan Angkatan Kerja	15.58	51.96	33.24
Sekolah	9.40	8.83	9.12
Mengurus Rumah Tangga	1.09	40.45	20.20
Lainnya	5.09	2.68	3.92
Jumlah	100	100	100
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	84.42	48.04	66.76
Tingkat Pengangguran	3.66	6.99	4.82

Sumber :BPS 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 Jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 66.76 persen, yang terdiri dari bekerja sebesar 63.54 persen dan pengguran sebesar 3.22 persen . Sedangkan Bukan angkatan Kerja sebesar 33.24 persen, yang terdiri dari sekolah sebesar 9.12 persen , mengurus rumah tangga sebesar 20.20 persen dan lainnya sebesar 3.92 persen. Pada kegiatan ini tingkat partisipasi angkatan kerja pada agustus 2016 sebesar 84.42 persen dengan tingkat

pengangguran sebesar 4.82 persen. Namun secara keseluruhan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah bekerja baik dalam mengurangi angka pengangguran.

Masalah pekerjaan ini menjadi sedemikian penting ketika kita membandingkan antara kebutuhan tenaga kerja dengan persediaan tenaga kerja yang ada baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Apabila dilihat dari segi keadaan kebutuhan dan persediaan mungkin akan sama (tidak ada kelebihan dan kekurangan) tetapi secara kualitatif mungkin terdapat perbedaan, hal ini dikarenakan masuknya tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang mempunyai tingkat keterampilan tinggi. Sehingga pada akhirnya masih akan menyebabkan pengangguran.

Kemiskinan dan kesulitan hidup yang melingkupi keluarga pekerja sektor informal di kota-kota (khususnya pedagang kaki lima) yang tercermin dengan tingkat pendapatan yang rendah dan bersifat tidak menentu mengakibatkan kemampuan mereka untuk berkonsumsi dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya dengan sendirinya rendah juga. Masalah yang mereka hadapi adalah mempertahankan kelangsungan hidup dalam memenuhi kebutuhan keluarga terutama kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan anak.

Keberhasilan pemerintah daerah dapat dilihat sejauh mana pemerintah daerah tersebut dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat daerah tersebut, peningkatan lapangan kerja yang tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik.

Tabel 1.2 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017

No	Kecamatan	Pedagang
1	Rengat	1075
2	Rengat Barat	738
3	Batang Peranap	444
4	Lirik	667
5	Kualu Cenaku	332
6	Pasir Penyu	455
7	Kelayang	638
8	Batang Gansal	312
9	Rakit Kulim	865
10	Peranap	443
11	Siberida	903
12	Lubuk Batu Jaya	976
13	Sungai Lala	838
14	Batang Cenaku	1520

Sumber: Disperindag Kabupaten Inhu, 2017

Pada tabel 1.2 memperlihatkan keberadaan sektor informal di Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 10.206 pedagang kaki lima. Kecamatan yang mempunyai pedagang terbesar adalah Kecamatan Batang Cenaku sebesar 1.520 Pedagang. Kecamatan yang kedua terbesar adalah Kecamatan Rengat sebesar 1.075 pedagang. Sedangkan Kecamatan yang mempunyai pedagang terkecil adalah Kecamatan Batang Gansal sebesar 312 pedagang. Dalam hal ini penulis tertarik meneliti Kecamatan Rengat dikarenakan Jarak yang dekat dengan keberadaan peneliti dan dana yang terbatas.

Sektor informal mendapat pengakuan maka timbul pertanyaan bagaimana menumbuhkan sektor ini? Selama ini kebijakan ekonomi neo-klasik lebih berpihak kepada usaha besar. Oleh karena itu kebijakan mekanisme pasar seolah olah lebih menguntungkan usaha besar daripada usaha kecil. Hernando de soto

adalah ahli ekonomi yang secara konsisten melihat bahwa kebijakan mekanisme pasar juga cocok untuk sektor usaha informal atau usaha mikro . Campur tangan pemerintah yang tidak terlalu banyak akan memberi kesempatan sektor informal tumbuh secara mandiri dan kuat. oleh karena itu De soto menginginkan pemerintah harus menghapus atau mengurangi aturan yang terlalu membelenggu sektor informal berkembang. Perkembangan sektor informal yang pesat akan membantu pemerintah dalam penciptaan lapangan pekerjaan.

Meskipun demikian sektor informal merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan disaat krisis. Bagi sebagian orang sektor informal dianggap tidak memiliki prospek yang baik, namun disisi lain sektor ini telah mampu memainkan peranan dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan memperluas kesempatan berusaha. Kemajuan sektor ini akan secara langsung meningkatkan pendapatan nasional sekaligus memperbaiki distribusi pendapatan dan memperbaiki kondisi masyarakat golongan lemah.

Perkembangan unit usaha sektor informal dapat dilihat dari kemajuan yang diperoleh seperti dari pengangguran modal usaha yang diperuntuhkan untuk usaha yang relatif dari modal tetap maupun variabel seperti tingkat upah tenaga kerja, bahan baku, sewa dan sebagainya dan pendapatan yang diperoleh usaha. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul : “ ANALISIS PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA INFORMAL DI KOTA RENGAT (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Berapa besar pendapatan tenaga kerja informal Pedagang Kaki Lima di Kota Rengat
2. Bagaimana kesejahteraan tenaga kerja informal Pedagang Kaki Lima di Kota Rengat

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui berapa besar pendapatan tenaga kerja informal Pedagang Kaki Lima di Kota Rengat
2. Untuk menganalisis kesejahteraan tenaga kerja informal Pedagang Kaki Lima di Kota Rengat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dengan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Dapat dijadikan sebagai salah satu masukan/informasi bagi pemerintah daerah khususnya pihak lembaga terkait dalam merumuskan kebijakannya untuk meningkatkan pendapatan tenaga kerja informal pedagang kaki lima khususnya dan tenaga kerja informal pada umumnya.
2. Sebagai wadah mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah serta sumbangan pemikiran untuk pengembangan dan menambah khasanah ilmu dan pengetahuan.

3. Sebagai referensi dan sumber informasi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dengan masalah yang sama maupu pengembangan dari penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi uraian dan penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneltian, manfaat penelitia, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka dan Hipotesa

Pada bab ini dipaparkan tentang landasan teori dan konsep yang berkaitan dengan topic dan permasalahan penelitian, seperti teori pendapatan, kesejahteraan, tenaga kerja, konsep sektor informal, teori dan konseo lainnya, serta pengajuan hipotesis penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi lokasi peneltian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis.

Bab IV : Gambaran Umum Daerah Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai Sejarah Kota Rengat, Keadaan Geografis Kota Rengat, Keadaan Penduduk Kota Rengat, dan Keadaan Mata Pencarian Penduduk Kota Rengat.

Bab V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang karakteristik responden, analisis pendapatan, dan analisis kesejahteraan.

Bab VI : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini dikemukakan tentang kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan, serta mengemukakan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Pendapatan

Sukirno (2000) mengatakan bahwa pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut. Dalam arti ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji/upah, sewa, bunga serta keuntungan/profit (Hendrik, 2011).

Menurut Munandar (2006), pengertian pendapatan adalah suatu pertambahan asset yang mengakibatkan bertambahnya owners equity, tetapi bukan karena pertambahan modal baru dari pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan asset yang disebabkan karena bertambahnya liabilities. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan (Hartoyo dan Noorma, 2010).

Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Definisi lain dari pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan

seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Dengan demikian pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. Pendapatan keluarga berupa jumlah keseluruhan pendapatan dan kekayaan keluarga, dipakai untuk membagi keluarga dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu: pendapatan rendah, pendapatan menengah dan pendapatan tinggi. Pembagian di atas berkaitan dengan, status, pendidikan dan keterampilan serta jenis pekerja seseorang namun sifatnya sangat relative (Bangbang Prayuda, 2014).

Sebagaimana pendapat di atas, bahwa pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat, oleh karenanya setiap orang yang bergelut dalam suatu jenis pekerjaan tertentu termasuk pekerjaan di sector informal atau perdagangan, berupaya untuk selalu meningkatkan pendapatan dari hasil usahanya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan sedapat mungkin pendapatan yang diperoleh dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Menurut Sukirno (2002) pendapatan dapat dihitung melalui tiga cara yaitu:

1. Cara pengeluaran, cara ini pendapatan dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran/pembelanjaan ke atas barang-barang dan jasa.
2. Cara produksi, cara ini pendapatan dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan
3. Cara pendapatan, dalam perhitungan ini pendapatan diperoleh dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima

Pendapatan adalah penerimaan bersih seorang, baik berupa uang konten maupun natura. Pendapatan atau juga disebut juga Income dari seorang warga

masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Dan sektor produksi ini membeli faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku dipasar faktor produksi. Harga faktor produksi dipasar (seperti halnya juga untuk barang-barang dipasar barang) ditentukan oleh tarik menarik, antara penawaran dan permintaan (Asmie, 2008).

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan (Suparmako, 2000 dalam Prihandini, 2013), yaitu :

1. Gaji dan Upah, imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan
2. Pendapatan dari usaha sendiri, merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak dihitungkan.
3. Pendapatan dari usaha lain, pendapatan yang diperoleh tanpa meluncurkan tenaga kerja, dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain, pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki seperti rumah, ternak dan barang lain, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan dari pasien, dan lain-lain.

Menurut Tohar (2003) dalam Kusnawardhani (2014) pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat yang sebelum dikurangi *transfer payment*. *Transfer Payment* yaitu pendapatan yang tidak berdasarkan balas jasa dalam proses produksi dalam tahun yang bersangkutan pendapatan menjadi :

1. Pendapatan asli, yaitu pendapatan yang diterima oleh setiap orang yang langsung ikut serta dalam produksi barang.
2. Pendapatan turunan (sekunder) yang pendapatan dari golongan penduduk lainnya yang tidak langsung ikut serta dalam produksi barang seperti dokter, ahli hukum dan pengawal.

Menurut Yudhohusodo dalam Poniwati (2006) tingkat pendapatan seorang dapat digolongkan dalam golongan yaitu :

1. Golongan yang berpenghasilan rendah (*low income group*) yaitu pendapatan rata-rata dari Rp. 1.500.000 perbulan
2. Golongan berpenghasilan sedang (*Moderate income group*) yaitu berpendapatan rata-rata Rp.1500.000-Rp.4.500.000 perbulan
3. Golongan berpenghasilan menengah (*midle income group*) yaitu berpendapatan rata-rata Rp.4.500.000-Rp. 9.000.000 perbulan
4. Golongan berpenghasilan tinggi (*high income group*) yaitu rata-rata berpendapatan lebih dari Rp. 9.000.000 perbulam

a. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun badan usaha tentunya di pengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan

pengalaman seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman maka makin tinggi pula tinggi pendapatannya, kemudian juga tinggi pendidikan sangat di pengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis barang dagangan (produk) dan faktor lainnya. Pada umumnya masyarakat selalu mencari tingkat pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi dibatasi oleh beberapa faktor tersebut. Menurut Arfida BR (2003:157-159) berbagai tingkat upah atau pendapatan terkait dalam struktur tertentu yaitu

1. Sektoral

Struktur upah sektoral mendasar dari pada kenyataan bahwa kemampuan satu sektor berbeda dengan yang lain. Perbedaan karena alasan kemampuan usaha perusahaan. Kemampuan finansial perusahaan ditopang oleh nilai produk.

2. Jenis jabatan

Dalam batas-batas tertentu jenis-jenis jabatan sudah mencerminkan jenjang organisasi atau keterampilan. Perbedaan upah karena jenis jabatan merupakan perbedaan formal.

3. Geografis

Perbedaan upah lain mungkin disebabkan karena letak geografis pekerjaan. Kota besar cenderung memberikan upah yang lebih tinggi dari pada kota kecil atau pedesaan.

4. Keterampilan

Perbedaan upah yang disebabkan keterampilan adalah jenis perbedaan yang paling mudah dipahami. Biasanya jenjang keterampilan sejalan dengan jenjang berat – ringannya pekerjaan.

5. Seks

Perbedaan diakibatkan jenis kelamin, dimana seringkali upah golongan wanita lebih rendah daripada apa yang diterima laki-laki.

6. Ras

Meskipun menurut hukum formal perbedaan upah karena ras tidak boleh terjadi, namun kenyataannya perbedaan itu ada. Hal ini mungkin karena produk kebudayaan masa lalu, sehingga terjadi stereo type tenaga menurut rasa tau daerah asal.

7. Faktor lain

Daftar penyebab perbedaan ini mungkin dapat diperpanjang dengan memasukan faktor – faktor lain, seperti masa hubungan kerja, ikatan kerja dan lainnya.

2.1.2 Teori Kesejahteraan

Setiap individu dan keluarga dalam masyarakat tentunya sangat mendambakan hidup dengan layak dan bahkan dengan kesejahteraan yang baik. Namun pada kenyataannya masih terdapat sebagian individu dan keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Menurut Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara agar

hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat mengembangkan fungsi sosialnya.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. (Suharto,2006:3)

Kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat di tandai dengan dibebaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan tingkat produktifitas masyarakat. (Todaro,2003;56)

Menurut BPS (2005) dalam penelitian Eko Sugiharto (2007) indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

Perumusan konsep kesejahteraan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa keluarga yang dikatakan sejahtera apabila memenuhi kriteria berikut :

1. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial maupun agama.

2. Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga; dan
3. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusuk di samping terpenuhi kebutuhan pokok.

2.1.3. Sektor Informal

Istilah sektor informal biasanya digunakan menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Namun, menurut Safaria, dkk. (2003; 4) kalangan akademisi masih memperdebatkan teori dan konsep mengenai sektor informal ini. Ada yang menganggap bahwa sektor informal muncul karena terbatasnya kapasitas industri-industri formal dalam menyerap tenaga kerja yang ada, sehingga terdapat kecenderungan bahwa sektor informal ini muncul di pinggiran kota besar. Sebagian yang lain menganggap bahwa sektor informal ini sudah lama ada. Ini adalah pandangan dari perspektif yang “dualistik”, yang melihat sektor “informal” dan “formal” sebagai dikotomi antara model ekonomi tradisional dan modern.

Menurut Safaria, dkk (2003; 6) sektor informal dipandang sebagai kekuatan yang semakin signifikan bagi perekonomian lokal dan global, seperti yang dicantumkan dalam pernyataan visi WIEGO (*Woman In Informal Employment Globalizing and Organizing*) yaitu mayoritas pekerja di dunia kini bekerja di sektor informal dan proporsinya terus membengkak sebagai dampak dari globalisasi: mobilitas capital, restrukturisasi produksi barang dan jasa, dan

deregulasi pasar tenaga kerja mendorong semakin banyak pekerja ke sektor informal.

Menurut ILO (*Internasional Labour Organization*) dalam Yustika (2002:193) yang dimaksud sektor informal adalah aktivitas-aktivitas ekonomi yang aturan lain ditandai dengan mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, operasinya dalam skala kecil, padat karya dan teknologinya yang bersifat adaptif, keterampilan diperoleh dari luar sistem sekolah formal, dan tidak langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.

Menurut Breman (dalam Manning, Eds. 1991:139) bahwa sektor informal merupakan suatu istilah yang mencukupi dalam istilah “usaha sendiri”, merupakan jenis kesempatan kerja yang kurang terorganisir, sulit di cacah, sering dilupakan dalam sensus resmi, persyaratan kerjanya jarang dijangkau oleh aturan hukum. mereka adalah kumpulan pedagang, pekerja yang tidak terikat dan tidak terampil, serta golongan-golongan lain dengan pendapatan rendah dan tidak tetap, hidupnya serba susah dan semi criminal dalam batas-batas perekonomian kota.

Kemudian menurut Hart (dalam Manning, Eds, 1991:76) merek yang terlibat dalam sektor informal pada umumnya miskin, kebanyakan dalam usia kerja utama (*prime age*), berpendidikan rendah, upah yang diterima dibawah upah minimum, modal usaha rendah, serta sektor ini memberikan kemungkinan untuk mobilitas vertikal. Menurut Breman (dalam Manning, Eds. 1991:142) sektor informal memiliki ciri-ciri sebagai berikut; padat karya, tingkat produktivitas yang rendah, pelanggan yang sedikit dan biasanya miskin, tingkat pendidikan formal yang rendah, penggunaan teknologi menengah, sebagian besar pekerja keluarga

dan pemilik usaha oleh keluarga, gampangnya keluar masuk usaha, serta kurangnya dukungan dan pengakuan pemerintah.

Sektor usaha informal merupakan bentuk usaha yang paling banyak kita temukan di masyarakat. Bentuk usaha yang ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tidak berpendidikan, bermodal kecil, dilakukan oleh masyarakat golongan bawah dan tidak mempunyai tempat usaha yang tetap. Sektor usaha informal terbuka bagi siapa saja dan sangat mudah mendirikaninya, sehingga jumlahnya tidak dapat dihitung, dengan banyaknya usaha ini berarti akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Ciri-ciri sektor usaha informal:

1. Tidak memiliki izin tempat usaha (biasanya hanya izin dari RW setempat)
2. Modal tidak terlalu besar, relatif kecil
3. Jumlah pekerja tidak terlalu banyak
4. Dalam menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal, keahlian khusus namun hanya berdasarkan pengalaman
5. Teknologi yang digunakan sangat sederhana
6. Kurang terorganisir
7. Jam usaha tidak teratur
8. Ruang lingkup usahanya kecil
9. Umumnya hanya dilakukan oleh anggota keluarga
10. jenis usaha yang dikerjakan biasanya dalam bentuk : pengrajin, perdagangan dan jasa
11. Hasil produksi cenderung untuk segmen menengah ke bawah
12. Biasanya pungutan yang dikeluarkan cukup banyak

Menurut Hart (dalam Manning, Eds.1991:79) ada dua macam kesempatan memperoleh penghasilan yang informal, anantara lain adalah sebagai berikut:

- b. Kesempatan memperoleh penghasilan yang sah, meliputi
 1. Kegiatan- kegiatan primer dan sekunder, pertanian, perkebunan yang berorientasi pasar, kontraktor bangunan, pengrajin usaha sendiri dan lain-lain.
 2. Usaha tersier dengan modal yang relatif besar, perumahan, transportasi, usaha-usaha untuk kepentingan umum, kegiatan sewa-menyewa dan lain lain.
 3. Distribusi kecil-kecilan seperti pedagang kaki lima, pedagang pasar, pedagang kelontong , pedagang asongan dan lain lain.
 4. Transaksi pribadi seperti pinjam- meminjam, pengemis.
 5. Jasa yang lain seperti pengamen, penyemir sepatu, tukang cukur, pembuang sampah dan lain-lain.
- c. Kesempatan memperoleh penghasilan yang tidak sah, meliputi:
 1. Jasa : kegiatan dan perdagangan gelap pada umumnya: penadah barang- barang curian, lintah darat, perdagangan obat bius, penyelundupan, pelacuran dan lain-lain.
 2. Transaksi : pencurian kecil (pencopet), pencurian besar (perampokan bersenjata), pemalsuan uang, perjudian dan lain-lain.

Banyak tulisan yang di buat telah mengakui peran sektor informal dalam perekonomian negara-negara berkembang. Namun sampai pada definisi belum ada konsensus untuk itu. Dalam usaha untuk menghindari kerancuan sektor

informal dapat dijabarkan sebagai aktivitas ekonomi yang berada di luar sektor swasta maupun sektor publik yang terdaftar. Merujuk pada definisi ini, usaha-usaha disektor informal mencakup aktivitas ekonomi mikro dan kecil yang tidak terdaftar baik oleh pemerintah maupun otoritas lainnya. Pada umumnya, usaha informal tidak mengikuti peraturan berkaitan dengan ketenagakerjaan, pajak atau memiliki ijin. Morrisson mengemukakan untuk memahami sektor informal, 3 hal harus diperhatikan:

1. Ukuran. Dari segi ukuran sektor informal adalah mereka yang berusaha sendiri atau usaha mikro yang mempunyai pekerja tidak lebih dari 20 orang
2. Kelembagaan yang informal. Dari segi kelembagaan/ aturan sektor informal mencakup perusahaan yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi kewajiban administrasi legal seperti, keselamatan kerja, pajak, dan hukum perburuhan.
3. Modal yang terbatas. Baik modal fisik maupun modal manusia per pekerja di sektor informal adalah rendah dan bahkan sangat terbatas. dengan kata lain sedikit sekali menggunakan modal fisik dan modal manusia yang berkualitas.

Sebenarnya definisi berdasarkan kriteria 1 dan 3 terukur sehingga dapat dipakai dimana saja dengan penyesuaian kondisi setempat. Definsi sektor informal berdasarkan kriteria 2 agak sulit dibuat ukuran yang bersifat umum karena masing masing negara mempunyai aturan main tersendiri. Namun demikian faktor kelembagaan tidak bisa diabaikan dalam pembahasan tentang

sektor informal. Agar sektor informal tidak dianggap sebagai sektor marjinal maka sektor informal dikategorikan sebagai usaha mikro. Dengan perubahan nama ini diharapkan tidak ada beban pemerintah memberi perhatian yang cukup untuk jenis usaha ini.

Orang pertama yang memperkenalkan konsep sektor informal adalah Keith Hart, seorang antropolog sosial. Sektor informal menurut Hart merupakan bagian dari angkatan kerja daerah urban yang bekerja di luar sektor formal (Gerxhani 2000). Hart menyamakan sektor informal dengan usaha sendiri (*self-employed*). Jadi menurut Hart mereka yang menerima upah secara teratur bekerja di sektor formal sedang mereka yang berusaha sendiri dan pendapatannya tidak teratur bekerja di sektor informal. Walaupun konsep sektor informal pada awalnya perhatian para ahli tentang sektor ini. Geraxhani (2000) mencoba mengemukakan beberapa ciri sektor informal, yaitu

1. Jaringan sosial dan *entry* yang mudah. Para pelaku usaha di sektor informal mempunyai jaringan sosial yang kuat dan dapat dipakai sebagai perlindungan di masa sulit. Selain sektor informal tidak membutuhkan syarat khusus untuk masuk berusaha.
2. Otonomi dan fleksibel. Banyak orang memilih masuk sektor informal karena mereka mempunyai fleksibilitas, kebebasan dan otonomi. Mereka bisa mengatur jam kerjanya.
3. Kemampuan bertahan. sektor informal bisa bertahan terhadap tekanan struktural dari luar. Oleh karena itu pemerintah diharapkan membantu

tumbuhnya sektor ini karena dalam jangka panjang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

Banyak tulisan yang pesimis dengan kehadiran sektor informal. Menurut pemahaman mereka sektor marjinal dan untuk orang miskin. Sektor ini dianggap tidak produktif sehingga tidak akan mempunyai kontribusi terhadap pendapatan negara. Namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor ini mempunyai potensi yang besar dalam akumulasi modal bagi pembangunan sebuah wilayah. Klarita Gerxhani mencoba mengidentifikasi keuntungan dan kerugian kehadiran sektor informal di suatu wilayah dari sisi ekonomi, sosial, dan politik (Gerxhani 2000).

1. Keuntungan Kehadiran Sektor Informal

a. Ekonomi

1. Menjamin tingkat kompetisi dan fleksibilitas produksi
2. Memberi sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal
3. Sektor ini mendorong upah di sektor formal untuk bergerak ke bawah
4. Menyediakan harga barang dan jasa yang murah
5. Memberi pendapatan yang cukup untuk individu tertentu
6. Upah tenaga kerja sangat murah
7. Upah yang murah dengan biaya administrasi/birokrasi yang murah mengakibatkan produktivitas modal sektor ini cukup tinggi
8. pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa penurunan GDP dapat ditutupi dengan kenaikan yang cepat sektor informal

b. Sosial

1. Kegiatan sektor informal memberi peluang pekerja kepada keluarga, memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasar dan peluang meningkatkan kesejahteraan rumah tangga mereka.
 2. Sektor informal memberi kebebasan untuk berinisiatif dan berkreasi
 3. Walaupun pendapatan dari sektor ini mungkin kecil namun lebih baik dari pada tergantung pada tunjangan subsidi pemerintah atau mati kelaparan
- c. Politik
1. Kehadiran sektor informal dapat berperan sebagai katup pengaman terhadap ketidakpuasan masyarakat luas atau ketegangan sosial
 2. Kegiatan sektor informal sering didorong dan dimanfaatkan para politisi untuk meningkatkan pengaruh politisi mereka
2. Kerugian Kehadiran Sektor Informal
- a. Ekonomi
1. Sektor informal tidak mempunyai kemampuan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah
 2. Muncul distorsi dari sektor informal terhadap indikator tingkat kesempatan kerja, tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi
 3. Sektor informal jarang membayar pajak sehingga pendapatan negara menurun akibatnya terjadi defisit anggaran belanja
 4. Lebih jauh dari itu sektor informal menekan kenaikan pajak

5. Kehadirannya memicu persaingan yang tidak sehat terhadap pengusaha yang bergerak sektor formal baik nasional maupun internasional
 6. Jika sektor informal terbesar secara meluas di sebuah negara maka akan kesenjangan teknologi antar negara
 7. Mereka yang berkiprah di sektor ini mempunyai produktivitas dan pendapatan rendah
 8. Kehadiran sektor informal mempunyai korelasi terbalik dengan pelayanan umum karena pendapatan pemerintah yang kurang
- b. Sosial
1. Mereka yang terlibat di sektor informal lebih melarat dari mereka yang terlibat di sektor formal. Hal ini tercemin dari kondisi tempat kerja yang buruk dan mereka tidak menerima tunjangan sosial apapun
 2. Penduduk lain mendapat informasi yang keliru tentang pendapatan nasional karena mereka yang terlibat di sektor informal memperoleh keuntungan karena tidak membayar pajak atau kewajiban lain. Ini tidak adil untuk mereka yang bekerja di sektor formal
- c. Politik
1. Oleh karena kegiatan ekonomi sektor informal tidak tercatat sehingga tidak di maksudkan dalam perhitungan statistik pendapatan. Ini akan mengurangi penilaian terhadap kinerja pemerintah sebagai pembuat keputusan

2. Kehadiran mereka mendorong korupsi dan lobi politik yang membawa akibat negatif

Jenis usaha yang masuk dalam sektor informal sangat bervariasi, mulai dari yang legal hingga ilegal. Ada beberapa sub-sektor yang di dalam sektor informal yang menjadi tempat penampungan mereka yang mau berusaha di sektor informal (Coate 2006). Sub-sektor tersebut meliputi:

1. Eceran (*retailing*): Sektor ini meliputi pedagang asongan, pedagang kaki lima (PKL), dan pedagang koran
2. Transportasi: mobil sewaan, taksi gelap, ojek, andong, becak, dan tukang pikul
3. Jasa pribadi: tukang semir, tukang sepatu, tukang pijat, tukang kayu dan tukang kebun
4. Penyewaan: penyewaan kursi, penyewaan, penyewaan peralatan pesta, dan rentenir
5. Jasa keamanan: penjaga malam, pengawal dan tukang parkir
6. Penjudian: penjual loteri dan penjual nomor buntut
7. Barang bekas: pemulung sampah, dan penjual barang bekas
8. Pekerja seks komersil (PSK)
9. Pengemis
10. Kriminal: copet, mencuri, dan merampok

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sektor eceran merupakan kegiatan yang kurang paling banyak menampung tenaga kerja. Sebagian besar yang bekerja di sektor ini adalah pedagang kaki lima dan pedagang asongan.

Mungkin ini bisa masuk akal karena sektor ini yang paling mudah untuk berusaha karena tidak membutuhkan keahlian khusus, dan modal yang dibutuhkan kecil.

Pembagian sektor formal dan informal dalam beberapa hal masih sering kabur. Salah satu pembedaan adalah sektor formal diatur pemerintah sedang sektor informal kurang diatur oleh pemerintah. Dalam kenyataan sektor informal ternyata sering diatur oleh pemerintah. Misalnya, pemerintah mengatur tentang lokasi pedagang kaki lima sehingga tidak bentrok dengan pengusaha di sektor formal. Sering terjadi sektor informal bisa juga membangun mitra dengan sektor formal melalui subkontrak. Sektor informal menjual produk yang dihasilkan sektor formal melalui subkontrak. Sektor informal menjual produk yang dihasilkan sektor formal dan sebaliknya sektor formal dapat menjual produk sektor informal. Jadi pembedaan di atas hanya berguna untuk kepentingan analisis dalam rangka pembuatan kebijakan.

2.1.4 Tenaga Kerja

Menurut Artoyo (1999:65), pengertian tenaga kerja secara umum adalah pengertian tentang potensi yang terkandung dalam diri manusia yang di kaitkan dengan pendayagunaan di berbagai kegiatan usaha yang ada. keterlibatan pada unsur jasa atau tenaga kerja dalam hubungan kerja sehingga timbullah penyebutan tenaga kerja bagi yang menyediakan jasa tersebut, pengusaha atau yang memperkejakan.

Menurut Kusumosuwidho (2002:193) Tenaga kerja (*manpower*) adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja jika mereka mau berpartisipasi

dalam aktivitas tersebut. Dalam literature biasanya adalah seluruh penduduk berusia 15-64 tahun, tetapi yang dipakai di Indonesia adalah seluruh penduduk berusia 10 tahun keatas.

Menurut Tambunan, (2002:13) tenaga kerja merupakan faktor yang heterogen sehingga diperlukan adanya operasional organisasi. Yang kemudian tenaga kerja dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu:

1. Tenaga kerja rohani, yaitu kerja dengan penerangan pikiran dalam proses produksi. Hal ini dapat dilaksanakan oleh para tenaga kerja misalnya untuk membuat suatu keputusan atau rencana, para tenaga kerja ini menyampaikan pendapatnya sebagai sumbangan kepada perusahaan atau bagaimana cara memecahkan suatu masalah, oleh karena itu diperlukan peran dari tenaga kerja tersebut.
2. Tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja pelaksana dalam proses produksi, artinya pemberian tenaga kerja perusahaan secara fisik. Hal ini dilaksanakan jika seseorang telah ikut serta membuat rencana maka ia mau turut serta untuk mencapai tujuan dari rencana yang telah dibuat tersebut. Disini para tenaga kerja secara fisik lewat proses produksi perusahaan.

Menurut Undang- undang ketenagakerjaan No.25 tahun 1997 Pasal 1. Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki ataupun perempuan yang sedang dalam atau melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka berprestasi dalam aktivitas tersebut (Subri,2003:57).

Ada dua pengertian tenaga kerja menurut Sitanggang dan Nachrowi (2004:106) :

1. Tenaga kerja umumnya tersedia dipasar kerja dan biasanya siap untuk dipergunakan dalam suatu proses produksi barang dan jasa. Kemudian perusahaan atau penerima tenaga kerja meminta tenaga kerja dan pasar kerja. Apabila tenaga kerja tersebut bekerja maka mereka akan menerima upah atau gaji
2. Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam setiap perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar disalah satu sisi merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat diandalkan tetapi disisi lain juga merupakan masalah besar yang berdampak diberbagai sektor.

Tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam proses produksi atau dalam kegiatan pembangunan sebagai sarana produksi lainnya yaitu karena tenaga kerjalah yang mengerakkan sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Tenaga kerja bersumber dari penduduk tetapi tidak semua

penduduk yang merupakan tenaga kerja, hanya penduduk yang telah mencapai usia tertentu baru dapat dianggap sebagai angkatan kerja atau tenaga kerja yang potensial.

Tenaga kerja bukan saja berarti jumlah buruh yang terdapat dalam perekonomian. Arti tenaga kerja meliputi keahlian dan keterampilan mereka miliki. Dari segi keahlian dan pendidikannya tenaga kerja dibedakan menjadi 3 golongan : (Sukirno,2000:77)

1. Tenaga kerja kasar yaitu tenaga kerja yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai keahlian dalam suatu bidang pekerjaan.
2. Tenaga kerja terampil yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian dari pendidikan atau pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu dan tukang memperbaiki tv dan radio
3. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan ahli dalam bidang tertentu seperti dokter, akuntan, ahli ekonomi, sarjana dan insinyur.

Menurut Benggolo, (1997:11) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik dari dalam maupun luar hubungan industri guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kemudian yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah yang meliputi bagian penduduk pada usia 15-65 tahun yang mempunyai pekerjaan tertentu dalam suatu kegiatan dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan baik bekerja maupun sementara tidak

bekerja karna suatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan (pekerja bebas professional seperti dukun dalang). Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan atau mengharapkan dapat pekerjaan yang termasuk kedalam kelompok angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dimasukan dalam katagori bekerja ataupun mencari pekerjaan (BPS Propinsi Riau, 2011:9).

2.1.5 Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima awalnya berasal dari pedagang yang menggunakan gerobak dorong yang memiliki tiga roda. Diatas kereta dorong itulah ia meletakkan berbagai barang dagangannya, menyusuri pemukiman penduduk dan menjajakannya kepada orang-orang yang berminat. dengan dua kaki pedagang kaki lima ditambah tiga roda kereta dorong itulah, mereka kemudian dikenal sebagai pedagang kaki lima. (Aldwin Surya, Dilema Pedagang Kaki Lima) Istilah pedagang kaki lima konon berasal dari jaman pemerintahan Rafles, Gubernur Jenderal pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu dari kata “five feet” yang berarti jalur pejalan kaki lima dipinggir jalan selebar 5 (lima) kaki. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan pedagang kaki lima.

Pedagang adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan, atau dikirim kepada orang atau badan lain, baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun

yang sudah dijadikan barang lain. Kegiatan perdagangan dapat menciptakan kesempatan kerja melalui dua cara. Pertama, secara langsung yaitu dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja yang benar. Kedua, secara tidak langsung yaitu dengan perluasan pasar yang diciptakan oleh kegiatan perdagangan disatu pihak dan pihak lain dengan memperlancarkan penyaluran dan pengadaan bahan baku (Kumiadi dan Tangkilisan,2002:21)

Menurut Darman,(2015:12) mengemukakan bahwa istilah pedagang kaki lima merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar terotoar yang dihitung dengan feet (kaki) yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit, sedang lebar terotoar pada waktu itu adalah lima kaki atau 1,5 meter lebih sedikit. Jadi orang berjualan diatas terotoar kemudian disebut pedagang kaki lima (PKL)

Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, emperan toko dan pinggir-pinggir jalan umum. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.

Ada tiga jenis pedagan kaki lima, antara lain :

1. Pedagang menetap

Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifa menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini konsumen harus mendatangi tempat dimana pedagang itu berada.

2. Pedagang semi menetap

Merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap sementara, yaitu hanya dalam saat-saat tertentu saja. Pedagang ini biasanya berada pada acara-acara tertentu, seperti pada acara permainan sepak bola di siliwangi biasanya pedagang itu berada disanan

3. Pedagang keliling

Pedagang keliling adalah pedagang yang biasa mengejar konsumen, biasanya pedagang ini menggunakan gerobak kecil atau menggunakan tanggungan. Pedagang ini biasanya mempunyai volume dagang yang kecil.

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaga dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas daerah milik jalan (DM/trotoar) yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki (*Pedestrian*). ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagang ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah “kaki” (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagan bergerobak yang mangkal secara statis ditrotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an) sebelumnya Pedagang Kaki Lima didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang krak telordan gelaran sayur dan lain sebagainya).

Pengertian pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor informal dapat dijelaskan melalui ciri-ciri sebagai berikut: Merupakan pedagang yang kadang-

kadang juga sekaligus juga sebagai produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lainnya (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya. Pedagang kaki lima di perkotaan tidak saja merupakan pelambangan sosial (Kartini Kartono. 1980)

2.1.6 Penelitian Terkait

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Musliana Tahun 2012	Analisa Tingkat Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pedagang Sayur di Pasar Wisata, Pasar Bawah)	bahwasanya pendapatan yang diperoleh oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Wisata, Pasar Bawah Pekanbaru yaitu dengan rata-rata pendapatan dalam sebulan sebesar Rp.9.268.000. Pendapatan terendah Pedagang Kaki Lima yaitu sebesar Rp.5.600.000 dan pendapatan tertinggi Pedagang Kaki Lima sebesar Rp. 12.040.000. Oleh karena itu dapat dikatakan sebanyak 15 responden sudah memenuhi Kehidupan Hidup Layak (KHL) atau sejahtera.
2	Andri Pradana Tahun 2015	Analisis Pendapatan Tenaga Kerja Sektor Informal Terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus Petugas Parkir) di Kota Pekanbaru.	Dari hasil analisis dengan cara membandingkan pendapatan terhadap Upah Minimum Provinsi Menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan petugas parkir perbulan sebesar Rp.3.287.407 di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp.2.095.000 pada tahun 2016.

3	Rahman Riandi Tahun 2011	Analisis Peran Sektor Informal Dalam Peningkatan Pendapatan dan penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pedagang Makanan Malam Hari di Kecamatan Tampan).	Menyimpulkan bahwa Berdasarkan hasil analisis total pendapatan kotor dari 15 usaha warung tenda pecel lele di kecamatan Tampan Pekanbaru adalah sebesar Rp.512.000.000/bulan bila dikurangi total biaya (TC) sebesar Rp.235.316.021/bulan maka akan diperoleh pendapatan bersih sebesar Rp.276.683.979/bulan.
---	--------------------------	--	---

2.1 Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan serta pengetahuan teori penulis, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga tenaga kerja informal pedagang kaki lima di Kota Rengat memiliki pendapatan yang tinggi.
2. Diduga tenaga kerja informal pedagang kaki lima telah memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Rengat yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, dimana terdapat pekerja sektor informal sebagai pedagang kaki lima yang mempunyai prospek yang cerah sehingga memberikan peranan penting terhadap kesejahteraan tenaga kerja di daerah Kota Rengat.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang kaki lima yang berada di Kota Rengat yang berjumlah 1075 pedagang kaki lima. Untuk memudahkan dalam pengumpulan data dan karena keterbatasan peneliti, maka sebagai sampel atau responden penelitian ditetapkan sebanyak 43 orang pedagang kaki lima.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik *probability sampling* yaitu *proportiomate stratified random sampling* dengan menggunakan rumus *slovin*. Menurut Sugiyono (2010; 63), *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Besarnya sampel dalam penelitian ini di tentukan dengan rumus slovin sebagai berikut

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dimana :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Batas toleransi kesalahan (error tolerance)

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 1.075 pedagang kaki lima.

Dengan batas toleransi (error tolerance) sebesar 5% , maka besarnya sampel pada penelitian ini adalah

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1075}{1 + (1075 \times 0,05^2)}$$

$$n = 291,5 \text{ dibulatkan menjadi } 292$$

Dari jumlah keseluruhan sampel maka peneliti mengambil 43 responden untuk di teliti.

3.3. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian, yang dilaksanakan dengan menggunakan instrument kuesioner atau daftar wawancara. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu data hasil kuesioner tentang karakteristik responden dan pendapatan yang diperoleh responden.
- b. Data sekunder, yaitu yang diperoleh dari BPS, Kantor Disperindag Kecamatan Rengat dalam bentuk data yang tersedia. Data sekunder dalam

penelitian ini antara lain yaitu keadaan geografis dan penduduk daerah penelitian, serta data lainnya yang dianggap dapat mendukung dalam analisis dan pembahasan hasil penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan atau peninjauan langsung kelapangan untuk melihat lebih dekat objek yang akan di teliti.

2. Kuesioner

Kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan tertulis tentang permasalahan yang diteliti, agar diisi oleh responden. Dalam penelitian ini kuesioner yang digunakan merupakan daftar pertanyaan yang disusun untuk kemudian diajukan kepada responden, sehingga peneliti memperoleh data yang dibutuhkan tentang permasalahan yang diteliti.

3. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya-jawab secara langsung dengan responden penelitiann, sehingga peneliti akan memperoleh data yang akura dan lebih rinci mengenai masalah yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen dan literature yang dianggap ada kaitannya dan dapat mendukung dalam analisis dan pembahasan masalah yang diteleti.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu cara menganalisis dengan menguraikan data- data dan fakta –fakta yang telah diperoleh dari objek penelitian atau responden penelitian dan ditabulasikan kedalam tabel-tabel yang disertai penjelasan dan pembahasan, lalu menghubungkannya dengan teori yang dapat mendukung, untuk kemudian dapat diambil suatu kesimpulan hasil penelitian tentang pendapatan tenaga kerja sector informal terhadap kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan perbandingan dengan Standar KHL, Kriteria Bappenas dan Kriteria BPS, sebagai Berikut:

1. Standar KHL

Untuk menganalisis tingkat kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rengat dilakukan dengan cara membandingkan besarnya pendapatan yang diperoleh pedang kaki lima dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Indargiri Hulu pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.751.076. Dimulai dari lajang, belum memiliki tanggungan, tanggungan anak 1, sampai tanggungan anak 5.

Tabel 3.1 : Standar Kehidupan Hidup Layak (KHL) dalam sebulan di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Tanggungan Keluarga Tahun 2018

NO	Keterangan	Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
1	Lajang	Rp. 2.751.076
2	Keluarga Tidak Ada Tanggungan	Rp. 3.251.076
3	Keluarga Tanggungan Anak 1	Rp. 3.751.076
4	Keluarga Tanggungan Anak 2	Rp. 4.251.076
5	Keluarga Tanggungan Anak 3	Rp. 4.751.076
6	Keluarga Tanggungan Anak 4	Rp. 5.251.076
7	Keluarga Tanggungan Anak 5	Rp. 5.751.076

Sumber: Data Olahan Sementara

2. Kriteria Bappenas

Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.

3. Kriteria BPS

Menurut Badan Pusat Statistik, indikator dan kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga adalah pendapatan, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukan anak ke jenjang dan kemudian mendapatkan fasilitas transportasi. indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu :

- a. Tinggi (> Rp. 10.000.000/ bulan)
- b. Sedang (Rp. 5.000.000/ bulan)
- c. Rendah (<Rp. 1.000.000/ bulan)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1. Letak dan Keadaan Georafis Kecamatan Rengat

Kecamatan Rengat merupakan ibukota Kabupaten Indragiri Hulu sekaligus termasuk sebagai kota tertua di Provinsi Riau. Secara umum keadaan topografinya adalah berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dataran dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut sekitar 10 meter. Desa kuantan Babu merupakan desa dengan wilayah tertinggi dari permukaan laut yang mencapai 17,0 meter, sedangkan Desa Rawa Bangun merupakan desa dengan wilayah paling dekat dengan permukaan laut, dengan ketinggian kurang dari 5 meter.

Seluruh desa/kelurahan di wilayah Rengat dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat dengan jarak desa/kelurahan terjauh 29km dari pusat Kabupaten dan 13 km dari pusat Kecamatan, yaitu Desa Rawa Bangun.

Batas Kecamatan Rengat:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Seberida
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Kuala Cenaku
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Rengat Barat

4.2. Kependudukan

Kegiatan ekonomi dan usaha membangun suatu perekonomian tidak terlepas dari unsur kependudukan, baik sebagai pedoman dalam perencanaan maupun dalam melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu perekonomian.

Saat ini jumlah penduduk Kecamatan Rengat pada akhir 2016 adalah 52.140 jiwa. Ini menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat pesat tiap tahunnya yang membuat Kecamatan Rengat dikategorikan sebagai kota besar ditinjau dari jumlah penduduknya.

Tabel 4.1 :Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengat, 2017

NO	Desa/ Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sei Guntung Tengah	612	594	1.206
2	Sei Guntung Hilir	693	668	1.361
3	Kuantan Babu	1.801	1.821	3.622
4	Kampung Dagang	2.537	2.589	5.126
5	Kampung Pulau	1.799	1.708	3.507
6	Kampung Besar Kota	4.431	4.611	9.042
7	Pasar Kota	355	403	758
8	Sekip Hulu	3.384	3.301	6.685
9	Sekip Hilir	2.651	2.985	5.636
10	Kampung Besar Seberang	1.361	1.401	2.771
11	Rantau Mapesai	352	383	735
12	Pasir Kemilu	2.358	2.417	4.775
13	Sungai Beringin	1.982	1.977	3.959
14	Pulau Gajah	240	216	456
15	Sungai Raya	798	781	1579
16	Rawa Bangun	487	435	922
Jumlah		25.841	26.299	52.140

Sumber : BPS Indragiri Hulu, 2017

Dari tabel diatas terlihat jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Rengat akhir tahun 2016 adalah 52.140 jiwa terdiri dari 25.841 laki-laki dan 26.299 perempuan yang berasal dari 11.649 rumah tangga. Dilihat dari jumlah penduduk tiap desa, dari 16 desa/kelurahan yang ada, kelurahan Kampung Besar kota memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu sebesar 9.042 jiwa. Sementara Desa Pulau Gajah memiliki jumlah penduduk yang paling kecil dibandingkan dengan dengan desa/kelurahan yang lainnya yaitu sebesar 456 jiwa.

4.3. Kehidupan Beragama

Dalam menjalani kehidupannya, agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, karena tanpa agama manusia tidak akan mengetahui arah hidupnya. Jadi dengan adanya agama maka setiap manusia akan mengetahui arah hidupnya dan akan merasakan kenikmatan dalam hidupnya.

Di kecamatan Rengat keberagaman agama sangat dihormati. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sarana peribadatan. Setidaknya tercatat ada sebanyak 37 masjid, 68 mushola dan 2 gereja, serta 1 vihara. Ini merupakan bukti bahwa kepedulian masyarakat terhadap kehidupan beragama sangat kuat. Selain itu, masjid dan mushola yang berada di desa-desa merupakan hasil swadaya masyarakat desa/kelurahan sendiri.

Meskipun adanya keberagaman agama dengan mayoritas beragama islam namun tidak mengurangi nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Demikian juga

dengan pemeluk agama lain yang secara jumlah merupakan minoritas tapi tidak ada sedikitpun perlakuan yang diskriminatif itu sendiri.

Adapun tempat ibadah di Kecamatan Rengat sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Jumlah Tempat Ibadah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengat, 2017

NO	Desa/ Kelurahan	Masjid	Musholah/ Surau	Gereja	Vihara / Klenteng
1	Sei Guntung Tengah	1	2	-	-
2	Sei Guntung Hilir	2	3	-	-
3	Kuantan Babu	2	5	-	-
4	Kampung Dagang	3	7	-	-
5	Kampung Pulau	2	6	-	-
6	Kampung Besar Kota	6	10	-	-
7	Pasar Kota	-	1	2	1
8	Sekip Hulu	4	6	-	-
9	Sekip Hilir	3	4	-	-
10	Kampung Besar Seberang	2	2	-	-
11	Rantau Mapesai	2	3	-	-
12	Pasir Kemilu	3	4	-	-
13	Sungai Beringin	2	7	-	-
14	Pulau Gajah	1	-	-	-
15	Sungai Raya	3	1	-	-
16	Rawa Bangun	1	7	-	-
	Jumlah	37	68	2	1

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat

4.4 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Penduduk merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas sumber daya manusia, disamping faktor-faktor lain. Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan di suatu daerah, maka daerah tersebut akan lebih cepat berkembang atau

maju dibandingkan dengan daerah yang masih rendah tingkat pendidikannya. Maka penyediaan fasilitas Kecamatan Rengat harus ditingkatkan.

Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan tuntutan pembangunan yang memerlukan jenis keterampilan keahlian di segala bidang serta ditingkatkan mutunya sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Faktor pendidikan juga dapat mencerminkan kemampuan penduduk untuk melakukan pembangunan suatu daerah. hal ini karena penduduk merupakan sumber pembangunan suatu daerah. Dengan memiliki pendidikan dan tingkat pengetahuan serta keterampilan yang lebih baik sudah tentu merupakan suatu jaminan bahwa pendapatan yang diterima juga akan semakin baik, sehingga dengan pendapatan yang lebih baik, tingkat pendidikan juga baik.

Selanjutnya untuk mengetahui kondisi pendidikan warga dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 : Jumlah Sekolah Umum Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Rengat, 2016

NO	Desa/ Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah
1	Sei Guntung Tengah	-	1	1	-	-	2
2	Sei Guntung Hilir	-	2	-	-	-	2
3	Kuantan Babu	1	1	-	-	-	2
4	Kampung Dagang	1	6	1	2	-	10
5	Kampung Pulau	2	1	1	-	-	4
6	Kampung Besar Kota	1	5	1	1	1	9
7	Pasar Kota	-	-	-	-	-	-
8	Sekip Hulu	6	7	-	1	-	14
9	Sekip Hilir	3	2	2	-	-	7
10	Kampung Besar Seberang	1	2	1	-	-	4
11	Rantau Mapesai	-	1	-	-	-	1
12	Pasir Kemilu	2	2	-	-	-	4
13	Sungai Beringin	-	3	2	2	-	7
14	Pulau Gajah	-	1	-	-	-	1
15	Sungai Raya	1	1	-	-	-	2
16	Rawa Bangun	2	1	-	-	-	3
Jumlah		20	36	9	6	1	72

Sumber : Indragiri Hulu Dalam Angka, 2017

Dilihat dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa penyediaan sekolah umum yang tertinggi adalah jenjang pendidikan SD dengan jumlah 36 sekolah, kedua jenjang pendidikan TK dengan jumlah 20 sekolah, ketiga adalah jenjang pendidikan SMP dan SMA dengan jumlah 9 sekolah dan 6 sekolah, penyediaan sekolah umum yang terendah adalah SMK dengan jumlah 1 sekolah.

4.5 Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Di Kecamatan Rengat terdapat beraneka ragam jenis lapangan usaha. Keanekaragaman dalam hal lapangan usaha inilah yang menggerakkan aktifitas.

Jika dilihat dari pola usaha maupun kegiatan ekonomi masyarakat Kecamatan Rengat, sebagian besar penduduk yang berdomisili diwilayah pinggiran kota masih banyak yang bergerak disektor pertanian, sedangkan yang lainnya berada dalam ruang lingkup perkotaan sudah mulai bekerja diberbagai lapangan usaha sebagai mata pencahariannya. Beranekaragamnya lapangan usaha yang ada di Kecamatan Rengat ini didasari karena adanya potensi dari Kecamatan Rengat itu sendiri yang mempunyai kemampuan dibidang ekonomi dan sumber daya alam. Sehingga kegiatan ekonomi masyarakat tidak terfokus hanya pada satu bidang usaha yang dominan. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 :Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Di Kecamatan Rengat, 2016

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negri Sipil (PNS)	5.552	11,06
2	Polisi/ TNI	4.550	9,06
3	Karyawan Swasta	7.840	15,61
4	Wiraswasta	6.366	12,68
5	Buruh	9.762	19,44
6	Petani	10.366	20,65
7	Industri Rumah Tangga	5.766	11,48
Jumlah		50.208	100,00

Sumber : Kantor Kecamatan Rengat 2017

4.6 Gambaran Tentang Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Rengat,

Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan terjadinya pengangguran. Pengangguran berarti tidak mempunyai sumber penghasilan sedangkan kebutuhan harus terus terpenuhi. Oleh karena itu sebagian besar masyarakat yang menganggur melakukan berbagai macam usaha untuk memperoleh penghasilan. Salah satu usaha yang banyak dijumpai di kota-kota besar adalah usaha sektor informal.

Sektor informal mempunyai banyak kegiatan dimana salah satunya adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima merupakan salah satu alternative untuk memperoleh pendapatan sehingga pedagang kaki lima ini sangat besar manfaatnya bagi peningkatan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah.

Jika dilihat dari sifat usahanya maka pedagang kaki lima yang di Kota Rengat dapat digolongkan kedalam dua golongan yaitu golongan usaha pokok dan golongan usaha tambahan. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan sebagian besar pedagang kaki lima ini adalah merupakan usaha pokok.

Usaha pedagang kaki lima ini juga merupakan salah satu pemecahan bagi pemerintah mengenai kekurangan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang menganggur, sehingga pedagang kaki lima ini mempunyai posisi yang penting bagi pemerintah untuk menanggulangi ledakan penduduk dan sekaligus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah.

Pedagang kaki lima merupakan bagian sektor informal yang banyak terlihat di kota-kota negara berkembang seperti Indonesia. Banyak penelitian berpendapat

bahwa Pedagang Kaki Lima adalah ciri-ciri di kota berkembang. Mereka berpendapat bahwa ekonomi sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima timbul dari keadaan sosial ekonomi berkembang. Oleh sebab itu kegiatan sektor informal tidak dapat ditiadakan dengan tanpa merusak sistem ekonomi Negara berkembang secara keseluruhan. Dengan demikian seluruh kebijaksanaan hendaknya memasukkan sektor informal sebagai pertimbangan dan saling menguntungkan.

4.6.1. Kondisi Pasar di Kecamatan Rengat

Pembangunan yang dilakukan merupakan usaha pertumbuhan dan memajukan kehidupan masyarakat melalui perubahan yang progresif. Kegiatan yang dimaksud guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, selain itu pembangunan bertujuan pula untuk pemerataan kesejahteraan hidup masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, melakukan berbagai usaha dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu setiap orang dituntut bekerja sekuat tenaga sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Tingkat kemajuan suatu masyarakat dapat dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat tersebut. Untuk itulah pengetahuan tentang kondisi ekonomi sangat penting guna melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mengetahui perkembangan pembangunan yang dilaksanakan. Bila ditelusuri secara lebih mendalam terlihat kondisi Pasar di Kecamatan Rengat sebagai berikut :

Tabel 4.5 Profil Pasar di Kota Rengat Tahun 2017

NO	Nama Pasar	Pedagang			Jumlah Pedagang
		Los	Kios	Dasaran	
1	Pasar Rakyat Rengat	500	250	50	800
2	Plaza Rengat	5	200	45	250
3	Pasar Sore	25	-	-	25

Sumber : Dinas Pasar Kota Rengat 2017

Pada Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa jumlah pedagang di Pasar Rakyat Rengat sebesar 800 pedagang yang terdiri dari los sebesar 500 pedagang , kios sebesar 250 pedagang, dasaran 50 pedagang. Jumlah pedagang di Plaza Rengat sebesar 250 pedagang yang terdiri dari los sebesar 5 pedagang, kios 200 pedagang, dasaran 45 pedagang. Jumlah pedagang di Pasa Sore sebesar 25 pedagang yang terdiri dari los 25 pedagang.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden

Diantara hal yang penting dalam kehidupan manusia adalah sikap selalu mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan usahanya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan dan tentunya juga berpengaruh pada kesejahteraan rumah tangga.

Bila dilihat dari sudut perekonomian, maka usaha kaki lima ini tergolong ke dalam sektor informal, dimana dalam menjalankan usaha ini tidak diperlukan keterampilan khusus yang diperoleh secara formal.

keberhasilan dalam melakukan usaha sebagai pedagang dipengaruhi oleh kondisi si penjual (responden) dan keluarganya. Dibawah ini akan diuraikan mengenai karakteristik para pedagang kaki lima (responden) antara lain sebagai berikut:

5.1.1. Tingkat Umur Responden

Umur seseorang dapat mempengaruhi kemampuan dalam melakukan pekerjaan, dimana pedagang dengan umur produktif lebih dinamis dalam berdagang daripada dibandingkan dengan usia non produktif. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan tingkat umurnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1: Pedagang Kaki Lima di Kota Rengat Menurut Kelompok Umur Tahun 2018.

NO	Tingkat Umur (tahun)	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	20-29	14	32,55
2	30-39	18	41,86
3	40-49	10	23,26
4	50 >	1	2,33
Jumlah		43	100

Sumber : Data Olahan, 2018

Pada tabel 5.1 diatas dapat diketahui bahwa responden dengan tingkat umur 20-29 tahun sebanyak 14 orang atau 32,55% , responden dengan tingkat umur 30-39 tahun sebanyak 18 orang atau 41,86%, dan reseeden dengan tingkat umur 40- 49 tahun sebanyak 10 orang atau 23,26% Sedangkan responden dengan tingkat umur lebih dari 50 tahun sebanyak 1 orang atau 2,33 %. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat umur dari keseleuruhan responden tersebut tergolong masih pada usia produktif yaitu berumur 20 sampai dengan 50 tahun.

5.1.2. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan responden pada dasarnya akan mempengaruhi pola pikir, kemampuan dan sikapnya terhadap pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan pendidikan atau pengetahuan yang cukup akan mendukung pelaksanaan pekerjaan seseorang dan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam bekerja, meskipun ada sebagian jenis pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan pendidikan yang tinggi. Karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Sekolah Dasar	5	11,63
2	SLTP / Sederajat	7	16,28
3	SLTA / Sederajat	31	72,09
Jumlah		43	100

Sumber : Data olahan, 2018

Pada tabel 5.2 di atas dapat diketahui bahwa responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 5 orang atau 11,63%, responden dengan tingkat pendidikan SLTP/ Sederajat sebanyak 7 orang atau 16,28%, dan responden dengan tingkat pendidikan SLTA/ Sederajat sebanyak 31 orang atau 72,09%. Dengan demikian maka sebagian besar responden penelitian berpendidikan setingkat SLTA/ Sederajat.

5.1.3. Jumlah Tanggungan Keluarga Responden

Tingkat kesejahteraan selain ditentukan oleh besarnya pendapatan seseorang, juga dapat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah tanggungan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan tanggungan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tanggungan Keluarga.

No	Tanggungan Keluarga (orang)	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	Tidak ada tanggungan	4	9,30
2	1-2	19	44,19
3	3-4	18	41,86
4	5-6	2	4,65
Jumlah		43	100

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari tabel 5.3 diatas dapat diketahui bahwa responden yang tidak memiliki tanggungan keluarga sebanyak 4 orang atau 9,30%, responden dengan tanggungan keluarga 1-2 orang sebanyak 19 orang atau 44,19%, responden dengan tanggungan keluarga 3-4 orang sebanyak 18 orang atau 41,86%, responden dengan tanggungan keluarga 5-6 orang sebanyak 2 orang atau 4,65%,. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa responden pada umumnya memiliki tanggungan keluarga 1-4 orang.

5.1.4. Status Pekerjaan

Status pekerjaan menjelaskan apakah pekerjaan yang dilaksanakan merupakan sebagai pekerjaan pokok atau sampingan. Sebagian pekerja pada sektor informal melaksanakan pekerjaannya sebagai pekerjaan pokok dan ada pula yang bekerja disektor informal hanya sebagai pekerjaan sampingan saja, sedangkan pekerjaan pokoknya ditempat lain. Dalam penelitian keseluruhan responden adalah pedagang kaki lima, dimana pekerjaan tersebut merupakan pokoknya atau tidak memiliki pekerjaan sampingan.

5.1.5. Lamanya Menjalankan Usaha

Semakin lama pengalaman seseorang pedagang dalam berusaha dibidang penjualan maka resiko kegagalan yang diambilnya relative semakin kecil. Pengusaha yang semakin berpengalaman akan dapat mengetahui situasi dan kondisi lingkungan, disamping itu akan cepat mengambil keputusan dan menentukan sikap dalam mengatasi dan mengatasi manajemen usahanya sesuai dengan pengalaman yang telah dialami selama pengusaha berusaha dalam penjualan.

Tabel 5.4 : Lama Responden Dalam Menjalankan Usaha Pedagang Kaki lima di Kota Rengat.

No	Lama Usaha (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	5	11	25,58
2	6 - 10	25	58,14
3	11- 15	7	16,28
Jumlah		43	100

Sumber : Data Olahan,2018

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase terbesar adalah pada lama usaha 6 - 10 tahun yaitu 25 responden atau sama dengan 58,14% hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata Pedagang Kaki Lima di Kota Rengat memulai usahanya 6 sampai 10 tahun .

5.2. Analisis Pendapatan Tenaga Kerja Informal (Pedagang Kaki Lima)

Adapun pendapatan responden yang diperoleh dari 43 responden pedagang kaki lima di Kota Rengat dapat di lihat dari tabel dibawah :

Tabel 5.5 Distribusi Rata – Rata Pendapatan Responden Tenaga Kerja Informal Pedagang Kaki Lima di Kota Rengat

No	Rata-rata Pendapatan Perbulan (Rp/bulan)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	1.000.000 – 4.999.999	6	13,95
2	5.000.000 – 9.999.999	29	67,44
3	10.000.000 – 14.999.999	8	18,60
4	>15.000.000	-	-
Jumlah		43	100
Rata-rata pendapatan (Rp)		7.618.605	

Sumber: Data Olahan 2018

Dari tabel 5.5 diatas, dapat diketahui bahwa Pedagang Kaki Lima dengan rata rata pendapatan bersih perbulan sebesar Rp 1.000.000 – Rp 4.999.999 sebanyak 6 orang atau 13,95%. Selanjutnya Pedagang Kaki Lima dengan rata–rata pendapatan perbulan Rp 5.000.000 – Rp 9.999.999 sebanyak 29 orang atau

67,44%, Pedagang Kaki lima dengan rata-rata pendapatan perbulan sebesar Rp 10.000.000 – Rp14.999.999 sebanyak 8 orang atau 18,60%. Dan pedagang kaki lima dengan rata-rata pendapatan perbulan sebesar lebih dari Rp 15.000.000 tidak ada atau 0%. Berdasarkan data hasil penelitian tersebut diketahui bahwa rata-rata pendapatan perbulan dari keseluruhan pedagang kaki lima yang di jadikan responden adalah sebesar Rp 7.618.605

5.3. Analisis Kesejahteraan Tenaga Kerja Informal Pedagang Kaki Lima

Setiap tenaga kerja yang diperkejakan pada berbagai sektor, baik sektor formal maupun informal tentunya mengharapkan agar pendaptan yang diperoleh dari usahanya bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraannya beserta keluarga, karena tercapainya kesejahteraan berarti akan menjamin pemenuhan berbagai kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup secara berkelanjutan. Namun pada kenyataanya tingkat kesejahteraan yang dicapai berbeda-beda, sesuai produktivitas kerja yang dicapai masing-masing tenaga kerja.

Tingkat kesejahteraan yang dicapai tenaga kerja disektor informal dari pendapatan yang di terima, seperti halnya pada Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dianalisis antara lain dengan cara membandingkan pendapatan tersebut dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Apabila pendapatan yang diperoleh dari upah kerjanya lebih dari atau minimal sama dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KLH), maka seseorang pekerja secara individual telah dapat memenuhi kebutuhan hidup secara lanyak. Disamping itu tingkat kesejahteraan juga dapat dianalisis menggunakan kriteria Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS).

5.3.1. Perbandingan Pendapatan dengan Standar Kehidupan Hidup Layak (KHL)

Setiap tenaga kerja yang diperkejakan pada berbagai sektor, baik sektor formal maupun informal tentunya mengharapkan agar pendapatan yang diperoleh dari upah atas hasil kerjanya bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan berarti akan menjamin pemenuhan berbagai kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup secara berkelanjutan. Namun pada kenyataannya tingkat kesejahteraan yang dicapai berbeda-beda, sesuai produktivitas kerja yang dicapai masing-masing tenaga kerja tersebut.

Tingkat kesejahteraan yang dicapai tenaga kerja di sektor informal dari pendapatan yang diterima seperti pada halnya pada pedagang kaki lima dapat di analisis antara lain dengan cara membandingkan pendapatan yang diperoleh dari upah kerjanya lebih atau minimal sama dengan ketetapan Tingkat Kehidupan Hidup Layak (KHL), maka seorang pekerja secara individual telah dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak

Dari hasil perhitungan rata-rata pendapatan perhari pedagang kaki lima seperti terdapat pada lampiran 5, diketahui distribusi perbandingan rata-rata pendapatan perhari bila dikalikan dalam sebulan dari keseluruhan responden terhadap Kehidupan Hidup Layak (KHL) sebagai berikut:

Tabel 5.6 Perbandingan Rata-rata Pendapatan Perbulan Responden Terhadap Kehidupan Hidup Layak (KHL) Pedagang Kaki Lima di Kota Rengat

No	Kategori	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Layak	41	95,35
2	Tidak Layak	2	4,65
Jumlah		43	100

Sumber : Data Olahan ,2018

Berdasarkan Tabel 5.6 diatas, dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima dengan pendapatan rata-rata perbulan lebih tinggi atau sama dengan Kehidupan Hidup Layak (KHL) adalah sebanyak 41 orang atau 95,35% sedangkan pedagang kaki lima dengan rata-rata pendapatan perbulan kurang dari atau dibawah Kehidupan Hidup Layak (KHL) adalah sebanyak 2 orang atau 4,65%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sebagian besar rata-rata pendapatan perbulan pedagang kaki lima sudah memenuhi Kehidupan Hidup Layak (KHL).

5.3.2. Analisis Kesejahteraan Berdasarkan Kriteria Bappenas

Menurut Bappenas, status pekerjaan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

adapun pengeluaran untuk kebutuhan pokok yaitu pengeluaran untuk konsumsi beras, lauk pauk, minyak tanah, minyak goreng, gula/kopi/the, dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok yaitu pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan, sosial, perumahan, pakaian, kesehatan, dan lain-lain.

Dari hasil perhitungan seperti terdapat pada lampiran 3, diketahui bahwa distribusi rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan pokok perbulan daripada keluarga Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:

Tabel 5.7. Distribusi Rata-rata Pengeluaran Keluarga Tenaga Kerja Informal Pedagang Kaki Lima Untuk Kebutuhan Pokok Perbulan

No.	Rata-rata Pengeluaran untuk Kebutuhan Pokok Perbulan (Rp/bulan)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	< 1.000.000	-	-
2	1.000.000 – 1.999.999	21	48,84
3	2.000.000 – 2.999.999	16	37,21
4	3.000.000 – 3.999.999	6	13,95
5	≥ 4.000.000	-	-
Jumlah		43	100
Rata-rata pengeluaran (Rp)		1.898,837	

Sumber : Data olahan, 2018

Data Tabel 5.7 diatas, dapat diketahui bahwa Pedagang Kaki Lima dengan rata-rata pengeluaran keluarga kebutuhan pokok perbulan sebesar kurang dari Rp.1.000.000 tidak ada atau 0%, Pedagang Kaki Lima dengan rata-rata pengeluaran keluarga untuk kebutuhan pokok perbulan sebesar Rp 1.000.000 – Rp1.999.999 sebanyak 21 orang atau 48,84%, Pedagang Kaki lima dengan rata-rata pengeluaran keluarga untuk kebutuha pokok perbulan sebesar Rp 2.000.000 – Rp2.999.999 sebanyak 16 orang atau 37,21%, Pedagang Kaki Lima dengan rata-rata pengeluaran keluarga untuk kebutuhan pokok perbulan sebesar Rp 3.000.000 – Rp. 3.999.999 sebanyak 6 orang atau 13,95%, dan Pedagang Kaki Lima dengan rata-rata pengeluaran keluarga untuk kebutuhan pokok perbulan sebesar Rp.4.000.000 atau lebih tidak ada atau 0%.

Berdasarkan data tersebut, maka responden dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok terbanyak yaitu Pedagang Kaki Lima dengan rata-rata pengeluaran keluarga untuk kebutuhan pokok perbulan sebesar Rp 1.000.000 – Rp 1.999.999 dan rata-rata pengeluaran keluarga Pedagang kaki Lima untuk keseluruhan responden adalah sebesar Rp 1.898,837

Sedangkan dari hasil perhitungan seperti terdapat pada lampiran 4 , diketahui bahwa distribusi rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok perbulan daripada keluarga Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:

Tabel 5.8. Distribusi Rata-rata Pengeluaran Keluarga Tenaga Kerja Informal Pedagang Kaki Lima Untuk Kebutuhan Bukan Pokok Perbulan

No.	Rata-rata Pengeluaran untuk Kebutuhan Pokok Perbulan (Rp/bulan)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	< 1.000.000	3	6,98
2	1.000.000 – 1.999.999	9	20,93
3	2.000000 – 2.999.999	15	34,88
4	3.000.000 – 3.999.999	11	25,58
5	≥ 4.000.000	5	11,63
Jumlah		43	100
Rata-rata pengeluaran (Rp)		2.451.651	

Sumber : Data olahan, 2018

Data tabel 5.8 diatas, dapat diketahui bahwa Pedagang Kaki Lima dengan rata-rata pengeluaran keluarga untuk kebutuhan bukan pokok perbulan sebesar kurang dari Rp 1.000.000 sebanyak 3 orang atau 6,98%, Pedagang Kaki lima Pedagang Kaki Lima dengan rata-rata pengeluaran keluarga untuk kebutuhan bukan pokok perbulan sebesar Rp 1.000.000 – Rp 1.999.999 sebanyak 9 orang atau 20,93%, Pedagang Kaki lima dengan rata-rata pengeluaran keluarga untuk kebutuha bukan pokok perbulan sebesar Rp 2.000.000 – Rp 2.999.999 sebanyak 15 orang atau 34,88%, Pedagang Kaki Lima dengan rata-rata pengeluaran keluarga untuk kebutuhan bukan pokok perbulan sebesar Rp 3.000.000 – Rp3.999.999 sebanyak 11 orang atau 25,58%, dan Pedagang Kaki Lima dengan rata-rata pengeluaran keluarga untuk kebutuhan pokok perbulan sebesar Rp.4.000.000 atau lebih hanya 5 orang atau 11,63%.

Berdasarkan data tersebut, maka responden terbanyak yaitu Pedagang Kaki Lima dengan rata-rata pengeluaran keluarga untuk kebutuhan bukan pokok perbulan sebesar Rp 3.000.000 – Rp 3.999.999 dan rata rata pengeluaran keluarga Pedagang kaki Lima untuk keseluruhan responden adalah sebesar Rp 2.454.651

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan pokok perbulan lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran rata-rata Pedagang Kaki Lima untuk kebutuhan bukan pokok perbulan. Dengan demikian sesuai kriteria Bappenas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga Pedagang Kaki Lima tersebut telah dapat dikategorikan sejahtera.

5.3.3. Analisis Kesejahteraan Berdasarkan Kriteria Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut Badan Pusat Statistik indikator dan kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga.

Untuk kriteria keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga , kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi, diperinci sebagai berikut :

- A. Keadaan tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai.
- B. Fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, WC dan jarak WC dari rumah.

- C. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 6 item, yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan dan alat kontrasepsi.
- D. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak sekolah dan proses penerimaan.
- E. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi terdiri dari 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan dan status kepemilikan kendaraan.

Tabel 5.8 Indikator Keluarga Sejahtera Menurut Badan Pusat Statistik

No.	Indikator Kesejahteraan	Kriteria	Skor
1	Pendapatan	- Tinggi (> Rp 10.000.000)	3
		- Sedang (Rp5.000.000-Rp10.0000.000)	2
		- Rendah (< Rp 5.000.000)	1
2	Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga	- Tinggi (>5.000.000)	3
		- Sedang (Rp1.000.000 – Rp 5.000.000)	2
		- Rendah (< Rp 1.000.000)	1
3	Keadaan tempat tinggal	- Permanen (11-15)	3
		- Semi Permanen (6-10)	2
		- Non Permanen (1-5)	1
4	Fasilitas tempat tinggal	- Lengkap (34 - 44)	3
		- Cukup (23 – 33)	2
		- Kurang (12 – 22)	1
5	Kesehatan anggota keluarga	- Bagus (<25%)	3
		- Cukup (25% - 50%)	2
		- Kurang (>50%)	1
6	Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan	- Mudah (16 – 20)	3
		- Cukup (11 – 15)	2
		- Sulit (6 – 10)	1
7	Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan	- Mudah (7 – 9)	3
		- Cukup (5 – 6)	2
		- Sulit (3 – 4)	1
8	Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi	- Mudah (7 – 9)	3
		- Cukup (5 – 6)	2
		- Sulit (3 – 4)	1

Sumber : Badan Pusat Statistik,2015

Berdasarkan nilai skor yang di peroleh, maka tingkat kesejahteraan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tingkat Kesejahteraan Tinggi : nilai skor 20 – 24
- b. Tingkat Kesejahteraan Sedang : nilai skor 14 – 19
- c. Tingkat Kesejahteraan Rendah : nilai skor 8 – 13

Dari data hasil penelitian tanggapan responden hasil kuesioner tentang indikator tingkat kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik tersebut seperti terdapat pada lampiran 4, dapat diketahui klasifikasi tingkat kesejahteraan keluarga dari pada Pedagang Kaki Lima sebagai berikut :

Tabel 5.9. Klasifikasi Tingkat Kesejahteraan Tenaga Kerja Informlral Pedagang Kaki Lima di Kota Rengat

NO	Klasifikasi Tingkat Kesejahteraan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Tinggi	6	13,95
2	Sedang	32	74,42
3	Rendah	5	11,63
Jumlah		43	100

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari tabel 5.9 diatas, dapat diketahui bahwa Pedagang Kaki Lima dengan tingkat kesejahteraan keluarga klasifikasi tinggi sebanyak 6 orang atau 13,95%, Pedagang Kaki Lima dengan tingkat kesejahteraan keluarga klasifikasi sedang sebanyak 32 orang atau 74,42 % dan Pedagang Kaki Lima dengan tingkat kesejahteraan keluarga klasifikasi rendah sebanyak 3 orang atau 11,63%. Berdasarkan dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya Pedagang Kaki Lima dengan tingkat kesejahteraan keluarga klasifikasi sedang.

Jadi, berdasarkan keseluruhan hasil analisis data yaitu analisis berdasarkan perbandingan pendapatan Pedagang Kaki Lima dengan standar Kehidupan Hidup Layak (KHL), analisis berdasarkan kriteria Bappenas, dan analisis berdasarkan kriteria BPS, maka Pedagang Kaki Lima tersebut pada umumnya telah dapat memenuhi kebutuhan hidup atau tergolong sejahtera dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian hipotesis yang dikemukakan telah dapat dibuktikan.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis perbandingan pendapatan Pedagang Kaki Lima dengan standar Kehidupan Hidup Layak (KHL) yang mana menunjukkan bahwa Pedagang Kaki lima dengan rata-rata pendapatan perbulan lebih dtinggi atau sama dengan Kehidupan Hidup Layak (KHL) adalah sebanyak 41 orang atau 95,35%, sedangkan Pedagang Kaki Lima dengan rata-rata pendaptan perbulan kurang dari atau dibawah Kehidupan Hidup Layak adalah sebanyak 2 orang atau 4,65%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sebagian besar rata-rata pendapatan perbulan Pedagang Kaki Lima telah mencapai atau sudah memenuhi Kehidupan Hidup Layak (KHL)

Selanjutnya dari hasil analisis berdasarkan kriteria Bappenas menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran keluarga pedagang kaki lima untuk kebutuhan bokok perbulan besar yaitu Rp. 2.454.651, jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran keluarga Pedagang Kaki Lima untuk kebutuhan pokok perbulan yaitu Rp. 1.898.837. Dengan demikian sesuia kriteria Bappenas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga Pedagang Kaki Lima tersebut telah dapat dikatagorikan Sejahtera.

Kemudian Dari Hasil analisis berdasarkan BPS Pedagang Kaki Lima dengan tingkat kesejahteraan keluarga klasifikasi tinggi sebanyak 6 orang atau 13,95%, Pedagang Kaki Lima dengan tingkat kesejahteraan keluarga klasifikasi sedang sebanyak 32 orang atau 74,42%, dan Pedagang Lima dengan tingkat kesejahteraan rendah sebanyak 5 orang atau 11,63%. Berdasarkan dari uraian diatas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya Pedagang Kaki Lima dengan tingkat kesejahteraan keluarga klasifikasi sedang.

5.4 Pembahasan

Dalam hal ini peneliti ingin mencari tahu bagaimana pendapatan dan kesejahteraan tenaga kerja informal (pedagang kaki lima) di Kota Rengat. Berdasarkan analisis data peneliti maka dilakukan pembahasan tentang hasil penelitian sebagai berikut:

5.4.1. Pendapatan Tenaga Kerja Informal di Kota Rengat

Bahwsanya pendapatan yang diperoleh tenaga kerja informal Pedagang Kaki Lima di Kota Rengat dapat dilihat pada lampiran 3 yaitu dengan rata-rata pendapatan Rp.7.618.605. Pendapatan terendah pedagang kaki lima Rp. 2.800.000 dan pendapatan tertinggi pedagang kaki lima sebesar Rp. 14.000.000. Dengan demikain secara keseleuruhan pendapatan tenaga kerja informal pedagang kaki lima secara keseluruhan telah mencapai atau lebih tinggi dari standar Kehidupan Hidup Layak (KHL).

5.4.2. Analisis Kesejahteraan Tenaga Kerja Informal di Kota Rengat

Dari hasil analisis kesejahteraan dapat di katagorikan sebagai berikut :

1. Dari hasil kriteria Kehidupan Hidup Layak (KHL) dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima dengan pendapatan rata-rata perbulan lebih tinggi atau sama dengan Kehidupan Hidup Layak (KHL) adalah sebanyak 41 orang atau 95,35% sedangkan pedagang kaki lima dengan rata-rata pendapatan perbulan kurang dari atau dibawah Kehidupan Hidup Layak (KHL) adalah sebanyak 2 orang atau 4,65%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sebagian besar rata-rata pendapatan perbulan pedagang kaki lima sudah memenuhi Kehidupan Hidup Layak (KHL).
2. Dari hasil kriteria Bappenas menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran keluarga Pedagang Kaki Lima untuk kebutuhan bukan pkok perbulan sebesar Rp. 2.454.651 lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran keluarga Pedagang Kaki Lima untuk kebutuhan pokok perbulan sebesar Rp. 1.897.837 . Dengan demikian sesuai kriteria Bappenas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga Pedagang Kaki Lima tersebut telah dapat dikategorikan sejahtera.
3. Dari hasil analisis berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada umumnya tenaga kerja informal di Kota Rengat (Pedagang Kaki Lima) dengan tingkat kesejahteraan keluarga klasifikasi *sedang*.

5.4.3 Hasil Peneltian Berdasarkan Teori

1. Sesuai dengan teori Poniwati (2006) golongan penghasilan menengah yaitu rata-rata pendapatan Rp.4.500.000 – Rp. 9.000.000 perbulan. Jadi

pendapatan tenaga kerja informal pedagang kaki lima di Kota Rengat termasuk kedalam golongan berpenghasilan menengah (*Middle Income Group*) yaitu sebesar Rp.7.618.605.

2. Sesuai dengan teori Suharto (2006:3) kesejahteraan sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian tenaga kerja informal pedagang kaki lima tersebut pada umumnya telah dapat memenuhi kebutuhan hidup atau tergolong sejahtera dari pendapatan yang diperolehnya dengan tingkat kesejahteraan keluarga klasifikasi sedang.

5.4.4 Hasil Penelitian Berdasarkan Penelitian Terdahulu

1. Berdasarkan hasil penelitian Musliana tahun 2012 dengan judul penelitian Analisis Tingkat Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pedagang Sayur di Pasar Wisata, Pasar Bawah) bahwsanya pendapatan yang diperoleh pedagang kaki lima (pedagang sayur) yaitu dengan rata-rata pendapatan dalam sebulan sebesar Rp. 9.268.000 dan mengalami hambatan dalam berusaha yakni modal yang terbatas sebanyak 6 orang atau 40%, kemudian sebanyak 2 orang atau 13,33% yang mengatakan adanya hambatan berusaha yaitu peraturan dari pemerintah, kemudian sebanyak 7 responden atau 46,67% yang mengatakan adanya hambatan dalam berusaha yaitu tempat yang kurang memadai. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini hanya membandingkan tingkat kesejahteraan berdasarkan standar Kehidupan Hidup Layak dan membahas

hambatan yang dialami oleh Pedagang Kaki Lima (Pedagang Sayur) seperti masalah modal yang terbatas, peraturan dari pemerintah dan tempat yang tidak memadai. Persamaan dari penelitian ini adalah Perbandingan tingkat pendapatan terhadap Standar Kehidupan Hidup Layak (KHL) dalam menentukan kesejahteraan.

2. Berdasarkan Hasil Penelitian Andri Pradana tahun 2015 dengan judul penelitian Analisis Pendapatan Tenaga Kerja Sektor Informal Terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus Petugas Parkir) di Pekanbaru. Bahwsanya rata-rata pendapatan perbulan dari keseluruhan petugas parkir yang dijadikan responden adalah sebesar Rp.3.287.407 telah mencapai atau diatas Upah Minimum Provinsi (UMP) yang di tetapkan. Berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada umumnya petugas parkir dengan tingkat kesejahteraan klasifikasi sedang. Jadi dapat disimpulkan perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas perbandingan pendapatan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) . Persamaan dari penelitian ini adalah Perbandingan kesejahteraan berdasarkan indicator kesejahteraan Badan Pusat Statistik (BPS).
3. Berdasarkan penelitian Rahman Riandi pada tahun 2011 dengan judul penelitian Analisis Peran Sektor Informal Dalam Peningkatan Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pedagang Makanan Malam Hari di Kecamatan Tampan). Berdasarkan penelitian rata-rata pendapatan bersih pedagang makanan pecel lele sebesar Rp. 18.445.598 perbulan dan penyerapan tenaga kerja rata-rata menggunakan tenaga kerja sebanyak 5 orang. hal ini disebabkan usaha ini sangat membutuhkan tenaga

kerja, jumlah tenaga kerja ahlinya dibutuhkan. Rata-rata bagi para tenaga kerja warung tenda pecel lele, bekerja di warung merupakan pekerjaan tetap yang mereka lakukan. Jadi dapat disimpulkan perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas bagaimana tingkat pendapatan usaha dan berapa besar penyerapan tenaga kerja di warung tenda pecel lele. Persamaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas sektor informal terhadap pendapatannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil diatas, kajian tingkat kesejahteraan Pedagang Kaki Lima dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwsanya pendapatan yang diperoleh Pedagang Kaki Lima di Kota Rengat dapat dilihat pada lampiran 3 yaitu dengan rata-rata pendapatan Rp.7.618.605. Pendapatan terendah pedagang kaki lima Rp. 2.800.000 dan pendapatan tertinggi pedagang kaki lima sebesar Rp. 14.000.000.
2. Dari hasil analisis berdasarkan kesejahteraan dapat di kategorikan sebagai berikut:
 - a. Dari hasil kriteria Kehidupan Hidup Layak (KHL) dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima dengan pendapatan rata-rata perbulan lebih tinggi atau sama dengan Kehidupan Hidup Layak (KHL) adalah sebanyak 41 orang atau 95,35% sedangkan pedagang kaki lima dengan rata-rata pendapatan perbulan kurang dari atau dibawah Kehidupan Hidup Layak (KHL) adalah sebanyak 2 orang atau 4,65%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sebagian besar rata-rata pendapatan perbulan pedagang kaki lima sudah memenuhi Kehidupan Hidup Layak (KHL).
 - b. Dari hasil kriteria Bappenas menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran keluarga Pedagang Kaki Lima untuk kebutuhan bukan pkok perbulan

lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran keluarga Pedagang Kaki Lima untuk kebutuhan pokok perbulan. Dengan demikian sesuai kriteria Bappenas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga Pedagang Kaki Lima tersebut telah dapat dikategorikan sejahtera.

- c. Dari hasil analisis berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada umumnya Pedagang Kaki Lima dengan tingkat kesejahteraan keluarga klasifikasi *sedang*.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Instansi pemerintah kota yang terkait hendaknya dapat memberikan dukungan dan dorongan peningkatan kesejahteraan para pekerja melalui perumusan kebijakan yang dapat meningkatkan produktifitas kerja dan pendapatan pekerja di sektor informal
2. Pihak pemerintah kota hendaknya dapat berperan aktif dalam membina sektor informal sehingga dapat tumbuh dan berkembang sehingga penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut lebih meningkat dan sekaligus dapat mengatasi masalah pengangguran.
3. Para tenaga kerja informal hendaknya selalu berupaya untuk dapat meningkatkan produktifitas kerjanya agar pendapatan yang diperoleh dimasa mendatang dapat lebih ditingkatkan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Artuyo,A.R, 1999, *Tenaga Kerja Perusahaan : pengertian dan peranannya*, Balai Pustaka,Jakarta
- Badan Pusat Statistik, 2011. *Pekanbaru Dalam Angka*, Pekanbaru
- Badan Pusat Statistik 2017. *Riau Dalam Angka*, Pekanbaru.
- Baridwan, Zaki, 2009. *Sistem Akuntansi : Penyusunan Prosedur dan Metode*, Edisi Kelima, BPFE-Yogyakarta.
- Benggolo, Aris, 1997. *Tenaga Kerja dan Pembangunan*, Yayasan Jasa Karya, Jakarta.
- Darman, *Kehidupan Sosial Pedagang Kaki Lima Di kota Samarinda* “Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 2015
- Gerxhani, K., 2000. *Informal Sectors in Development and Less Development Countries : A Literature Survey*, Amsterdam, Tinbergen Institute.
- Hendriksen, Eldon S, 2007. *Teori Akuntansi*, Terjemahan oleh Marianus Sinaga, Erlangga, Jakarta
- Hendar dan Kusnadi, 2005. *Ekonomi Koperasi*, Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia, Jakarta
- John J. Wild. 2003. *Financial Accounting : Information For Decisions*. Edisi Kedua. Diterjemahkan oleh Yanivi S. Bachtiar. Jakarta:SelembaEmpa.
- Kumiadi dan Tangkilisan, *Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di Jakarta*, (Yogyakarta:YPAPI,2002)
- Kusumowidho, 2000. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Manning, Chris dan Noer Effendi, Tadjuddin, 2000, *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Prawirokusumo, Soeharto, 2001. *Ekonomi Rakyat (Konsep dan Kebijakan Strategi)*,BPFE, Yogyakarta.
- Rosyidi, Suherman, 2009. *Pengantar Teori Ekonomi ; Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Rajawali Pers,Jakarta

- Safaria, A. Friday, dkk, 2003. *Hubungan Perburuhan di Sektor Informal*, Penerbit Yayasan Akatiga, Bandung.
- Sitanggang, R.I, dan Djalal Nachrowi. 2004. *Kebijakan Ketenagakerjaan dengan Orientasi pada Data dan Fenomena Global*, Grasfindo, Jakarta.
- SK Gubernur Riau Nomor 1058 Tahun 2016 per 21 November 2016 Riau, *Tentang Penetapan UMP 2017*
- Subri, Mulyadi, 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Suharto, 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Jakarta
- Sukirno, Sadono, 2002. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, LPFE-UI, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 1987. *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Bina Aksara, Jakarta.
- Tambunan, Tulus, 2002. *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Todaro, Michael P., 2003. *Economic Development*, New York : Addison Wesley Longman, Inc.
- Undang -Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
- Yustika, Ahmad Erani, 2000. *Industrialisasi Pinggiran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hendrik. *Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Pulau Besar dan Danau Bawah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*. Skripsi, 2011, Jurnal, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru
- Kris, Ciptawan. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keuntungan Pedagang Makanan dan Minuman di Glading Langen Boga Surakarta*. Jurnal, 2009, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Solo

Sugiharto, Eko. *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik*. Jurnal, 2007, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman, Samarinda



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau